

PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN  
POLITIK STUDI TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KOTA MAKASSAR



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar

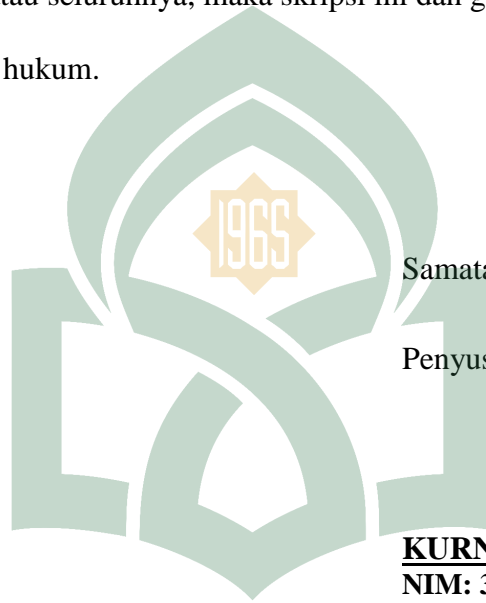
Oleh

**KURNIAWAN**  
NIM. 30600108018

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata, 25 April 2014

Penyusun,

**KURNIAWAN**  
**NIM: 30600108018**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **KURNIAWAN**, Nim : **30600108018**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti, dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “PERAN PARTAI Keadilan Sejahtera dalam Pembangunan Politik Studi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi di Kota Makassar”, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk proses selanjutnya.

Samata , 25 April 2014

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

**Drs. H. Darwis Muhdina, M.Ag**

**Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si**

**NIP: 195212311986031015**

**NIP: 197503122006041001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pembangunan Politik Studi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi Di Kota Makassar, yang di susun oleh saudara Kurniawan, Nim: 30600108018, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di laksanakan pada hari, Jumat 25 April 2014 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat yang memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 April 2014

### DEWAN PENGUJI



Ketua	: Dr. Tasmin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Andi Muh. Ali Amiruddin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Prof Dr. H. Muh. Ramli, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembingbing I	: Drs. H. Darwis Muhdina, M.Ag.	(.....)
Pembingbing II	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	(.....)

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.A**  
**NIP. 196912051993031001**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita ke dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Peran partai keadilan sejahtera dalam pembangunan politik studi terhadap pemberdayaan masyarakat kehidupan berdemokrasi di kota makassar”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda H.ABD RASYID. dan Ibunda HJ.DARMAWATI tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan iringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta para pembantu Dekan beserta seluruh staf dan karyawannya.
4. Bapak Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag, selaku pembantu Dekan I, bapak Drs. Ibrahim M.Pd selaku pembantu Dekan II, dan bapak Drs.H.M. Abduh Wahid M,Th.I selaku pembantu Dekan III fakultas ushuluddi dan Filsafat UIN Aladdin Makassar.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Andi Ali Amiruddin, S.Ag, M.Th selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik.
6. Drs.H. Darwis Muhdina, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan

pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.

8. Para teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2008 Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat.

Penulis senantiasa berdoa semoga bantuan dinilai disisi Allah swt sebagai amal shaleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda kepada pihak yang selama ini telah membantu dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Samata, 02 April 2014

Penulis,

**KURNIAWAN**  
**NIM: 30600108018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
D. Landasan Teoritis .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	26
F. Metode Penelitian.....	28
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	30
<b>BAB II SEKILAS SEJARAH TENTANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	
A. Partai Keadilan Sejahtera .....	33
1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera.....	33



2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	37
B. Transformasi Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera .....	40
1 Transformasi idiologi Partai keadilan ke Partai Keadilan sejahtera di kota Makassar.....	40
2 Transformasi kelembagaan Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera di kota Makassar.....	41
3 Transformasi jaringan dan strategi PKS di kota Makassar.....	57
C. Berdirinya PKS di Sulawesi Selatan dan di kota Makassar .....	60
D. Struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Makassar.....	61
E. Dinamika Politik PKS di Kota Makassar .....	63
<b>BAB III EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KOTA MAKASSAR</b>	
A. Pembentukan identitas politik PKS di kota Makassar .....	65
1. Pembentukan Kader Politik Handal .....	65
2. Pembentukan jaringan politik PKS .....	67
a. Ligo' .....	67
b. Tarbiya .....	68
c. KAMMI .....	71
B. Respon PKS terhadap kebijakan politik di Kota Makassar.....	72
1. Perda Baca Tulis Al-qur'an .....	72
2. Reklamasi pantai .....	73
3. Mendorong patisipasi politik.....	74

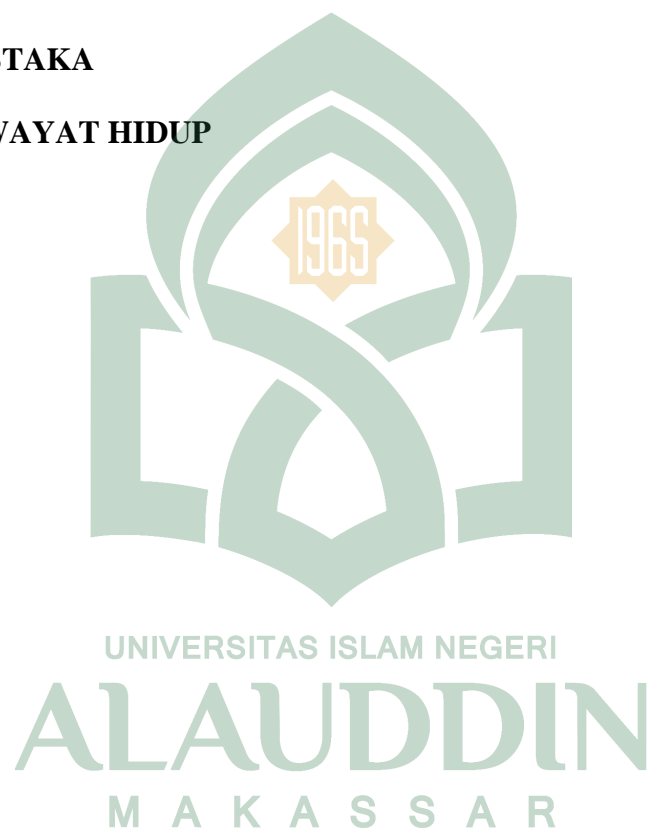
a. Memanfaatkan Media Sosial .....	74
b. Diskusi Publik.....	75
c. Pandangan KAMMI terhadap PKS.....	75

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Nama : Kurniawan  
Jurusan : Ilmu politik  
Judul Skripsi : Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pembangunan Politik Studi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi Di Kota Makassar

Skripsi ini membahas tentang peran Partai Keadilan Sejahtera dalam pembangunan politik terhadap masyarakat khususnya di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori tentang demokrasi dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menganalisa studi kasus pada skripsi ini. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemberdayaan masyarakat dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan publik sudah dilaksanakan dan berhasil dijalankan oleh DPC PKS kota Makassar. Partisipasi tersebut dapat terwujud secara alami setelah kehadiran PKS ditengah-tengah masyarakat di Kota Makassar. Yang sudah didukung oleh masyarakat yang berdaya: yaitu, masyarakat yang penuh tanggung jawab terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penuh dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

PKS telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik yang ditopang oleh bidang kader yakni, melakukan penyuluhan dan tata cara pemilihan yang baik, agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan pembekalan tentang kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi.

Strategi yang dilakukan PKS yakni selalu siap siaga turun langsung kelapangan melakukan observasi, dan melakukan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi yang bertujuan untuk menumbuhkan kader yang mampu menjadi pemimpin yang siap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera lebih di tuntut meningkatkan kualitas kaderisasi yang mampu mengelola dan mengembangkan partainya secara profesional untuk menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik, terutama untuk mengembangkan kader yang berkualitas, berakhlak, dan bermoral serta kehadiran PKS di Kota Makassar dapat meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : PKS, Demokrasi, Pemberdayaan, Kota Makassar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama sekaligus Negara. Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba lengkap, dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, paradigma ini kerap mengiring ummat Islam untuk menampilkan agamanya dalam bentuk formal, yakni dengan menampilkan literatur bangunan politik islam waktu silam, tanpa upaya memodifikasi dan kontekstualisasi dengan kebutuhan realitas.<sup>1</sup>

Agama Islam menganjurkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, amanah musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan Negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan “bahwa pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan sosial termasuk berdemokrasi”.<sup>2</sup>

Demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan lapisan masyarakat kelas bawah samapi masyarakat kelas elit, sebut saja

---

<sup>1</sup> Khamami Zada dan Arif Arafah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2004), cet. Ke-1 h. 24.

<sup>2</sup> Motori Abdul Jalil, “*pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi*”, *Dalam Agama dan Demokrasi* (jakarta: P3M, 1994, cet. Ke-2, h. 12

tokoh masyarakat, politisi, mahasiswa, cendekiawan, dan seterusnya. Lebih dari itu, demokrasi diyakini sebagai salah satu alternatif sistem nilai yang berkembang dalam sendi kehidupan manusia dan masyarakat, bahkan negara.<sup>3</sup>

Demokrasi merupakan salah satu aliran filsafat yakni suatu aliran yang meninjau asal-usul kekuasaan politik suatu negara yang didasarkan kepada keinginan umum rakyat. Dalam hal ini rakyat dapat digambarkan sebagai salah satu hukum yang melahirkan keinginan umum dan mengilhami isi paham demokrasi. Kekuasaan yang menganut sistem demokrasi dalam suatu negara berada ditangan rakyat itu sendiri, pada hakikatnya demokrasi berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>4</sup>

Dari sudut organisasi, demokrasasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Pendapat lain menyebutkan bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas orinsio kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ubaidah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, dan HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionlism Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 141.

<sup>5</sup> Mahmud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h.8

Dalam masyarakat yang besar, rakyat hanya bisa memberikan pengaruh yang kecil sebagai individu, tetapi pengaruh itu bisa besar jika mereka bergabung dengan membentuk suatu perkumpulan. Partai politik menjalankan berbagai macam peran dan fungsi. Keberadaan partai-partai politik yang merupakan bagian dari suatu mekanisme penting dalam kehidupan demokrasi.<sup>6</sup>

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasan-alasan yang pada akhirnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan berpolitik dalam sistem penyelenggaraan negara. Ketika berdemokrasi itu secara sederhana diartikan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, maka keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik menjadi prasyarat. Sebab, jika tidak ada partisipasi rakyat, tidak ada “dari dan oleh rakyat”, akan tetapi rakyat tidak mungkin dapat terlibat dalam proses kebijaksanaan publik, ketika rakyat sangat apatis, masa bodoh, terpinggirkan, hanya sebagai pelengkap dalam sistem kenegaraan.<sup>7</sup>

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan

---

<sup>6</sup> David Betham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta, Kanisius, 2004), h.4

<sup>7</sup> Ahmad Azizi Qodri, *Peremberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi. Di Indonesia*, (Jakarta: Lemhannas, 2003), h. 11.

politik dan merebut kekuasaan, kedudukan politik biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>8</sup> Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bagi PKS kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama insan dan semua golongan, guna mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negar yang bermartabat.<sup>9</sup>

PKS sering di sebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar satu tahun setelah dideklarasikan, (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999. Dalam pemilu 2004 sampai 2009, PKS mampu meningkatkan jumlah suara yang sangat signifikan. Partai yang karena alasan electoral threshold berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.<sup>10</sup>

Dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis, menemui jawaban atas permasalahan tersebut dengan meneliti tentang peran partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan kehidupan berdemokrasi di kota makassar dan ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

---

<sup>8</sup> Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159-161.

<sup>9</sup> Herdi Sahrasad, PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan, (Jakarta: Psik Paramadina, 2008), h 35.

<sup>10</sup> M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang Parlemen, (Yogyakarta: Lkis 2008), h. 1.

“Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pembangunan Politik  
Studi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi Di  
Kota Makassar”

**B. Rumusan masalah**

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana peranan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di kota Makassar?
2. Bagaimana respon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Pembangunan masyarakat di Kota Makassar?

**C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran keberadaan PKS serta kondisi masyarakat khususnya di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui respon yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pembangunan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di kota Makassar,



## 2. Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat itu merupakan usaha untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
2. Dapat mengetahui secara mendalam mengenai peranan Partai Keadilan sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UIN Makassar dalam pengembangan keilmuan dibidang politik.

## D. Landasan Teori

### a. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip demokrasi

1. Demokrasi mempunyai arti penting bagi yang menggunakannya, sebab hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi negara dijamin saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang populer dan sering dipakai negara termasuk juga negara-negara di dunia muslim. Namun pakar ilmu politik belum sepakat, apakah demokrasi itu sekedar alat atau untuk mencapai tujuan, ataukah menjadi tujuan itu sendiri.<sup>11</sup>

Secara etimologis, demokrasi dari kata Yunani, yang berasal asal katanya, rakyat berkuasa dan terbagi dalam dua kata “demos” dan

---

<sup>11</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 17

cratos” demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.<sup>12</sup> Yang memiliki arti kekuasaan ada ditangan rakyat secara penuh, dan juga berarti bahwa dalam suatu pemerintahan suatu individu yang lain memiliki kesamaan hak dalam segi politik, mereka pun sama-sama berdaulat.

Secara terminologis, demokrasi menurut kamus besar Indonesia diartikan dengan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>13</sup> istilah demokrasi saat ini telah diterima oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia. Bahkan pemerintahan otoriter pun menggunakan demokrasi istilah “demokrasi” untuk mengkarakteristikan rezim dan aspirasi mereka. Istilah demokrasi ini, mempunyai berbagai pengertian dalam pandangan kontemporer, sebagaimana dapat dilihat dalam definisi berikut ini:

- a. Menurut Josep A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook berpendapat bahwa, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50

<sup>13</sup> Depdikbud Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1, h. 220.

penting secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

- c. Philippe C. Smitter dan Yenny Lynn Karl, mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang terpilih.<sup>14</sup>
- d. Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik.<sup>15</sup>

Pendapat para tokoh tentang pengertian demokrasi diatas dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu, bahwa dalam demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pemuat, penentu keputusan dan pemegang kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara langsung maupun secara

---

<sup>14</sup> Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, h. 73-74

<sup>15</sup> A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic education): Demokrasi; HAM, dan Masyarakat Madani, h. 163

tidak langsung oleh lembaga perwakilan yang merupakan wadah yang mewakilinya.<sup>16</sup>

Demokrasi juga menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang relatif mapan, sehingga pembaharuan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal itu, masalahnya bukan saja menyangkut produk-produk hukum berupa perundang-undangan, kebijakan administrasi atau putusan hakim, tetapi menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur sosial yang menopangnya. Hal ini berkaitan dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial yang lebih luas.<sup>17</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan kekuatan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan

---

<sup>16</sup> Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 68

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 76

<sup>18</sup> [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id), diakses 3 desember 2013

kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

## 2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi yang merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa terkecuali adalah benar-benar merupakan cita-cita yang luhur. Cita-cita ini akan terwujud jika adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat serta kemauan kuat dari pemerintah (Political Will).<sup>19</sup>

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan terwujud prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan definisi diatas diambil pengertian bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Dalam mengembangkan demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi harus selalu dipegang, karena hal ini merupakan “roh” dari demokrasi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu antara lain, yaitu:

1. Prinsip Persamaan, Prinsip ini mengandung dua makna, yaitu kesamaan (The Sameness) dan kesesuaian (The Fitness).

---

<sup>19</sup> Muhammad Mufid, Politik Dalam Pandangan Perspektif Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 69

<sup>20</sup> J. Soedjati Djiwandono, demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, (The RI DEPISTITUTE,2003), H. 7.

Kesamaan disini diartikan sama rasa dan sama rata, jadi setiap warga masyarakat akan merasa diberi hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan kesesuaian dapat diartikan proporsional, bahwa setiap anggota masyarakat diberi hak sesuai dengan kemampuannya.<sup>21</sup>

2. Prinsip kebebasan individu yang satu tidak mengganggu kebebasan yang lainnya, artinya semua orang mempunyai kebebasan, tetapi karena setiap orang mempunyai kebebasan, maka akan menjadi benturan kebebasan dengan orang lain. Bila ini biarkan, akan terjadi anarki. Padahal demokrasi berbeda dengan anarki. Demokrasi yang tanpa aturan akan menjadi anarki, karena kekuatan yang besar bisa menjadi ancaman bagi keadilan dan hak orang lain. Karena demokrasi sangat menganjurkan pentingnya aturan hukum mau pun bentuk pengaturan yang lain, agar berbeda dengan anarkisme.
3. Prinsip keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan pemerintah, keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan sangatlah penting, karena disitulah intinya.<sup>22</sup>
4. Prinsip Pluralisme, prinsip ini memberikan penegasan dan pengakuan terhadap adanya perbedaan, keragaman budaya,

---

<sup>21</sup> Ismail dan Abdul Mukti, (ed), Pendidikan Demokrasi dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet ke-1, h. 61.

<sup>22</sup> J. Soedjati Djiwandono, Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemilu, h. 7-8

agama, bahasa, etnis, pemikiran dan lain-lainnya merupakan suatu yang tidak bisa terelakkan.<sup>23</sup>

5. Prinsip Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi ini menegaskan bahwa keberadaan manusia dengan segala macam potensinya harus diakui sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kesamaan derajat dengan sesama manusia lainnya. Pada hakikatnya semua manusia adalah sama, karena perbedaan perlakuan atas manusia yang didasarkan oleh kemajuan itu tidak dibenarkan.<sup>24</sup>

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun, demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial

---

<sup>23</sup> A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, h. 167

<sup>24</sup> Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, h. 71

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo dan makro.

1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai juga strategi sistem besar (large system strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik,



adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi-strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>25</sup>

4. Penyokong: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.<sup>26</sup>

Teknik atau cara yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self determination),

---

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), h. 66-67.

<sup>26</sup> Ibid h. 69-70

menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (client partnerships).

2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui, ketaatan terhadap kode etik profesi, ketertiban dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak setaraan kesempatan.

Pelaksanaan pendekatan diatas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerja sosial yaitu :

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif . karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber-sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara, hasil dirumuskan oleh mereka sendiri
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci berpartisipasi dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.<sup>27</sup>

Tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial yaitu:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat, harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 72

5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan nama sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi kontrak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.<sup>28</sup>

c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara konseptual, berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.<sup>29</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu

---

<sup>28</sup> Ibid h. 74

<sup>29</sup> Ibid h. 57

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Ada beberapa fungsi masyarakat: keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama, atau gotong royong, control sosial, organisasi dan partisipasi politik.<sup>30</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan

---

<sup>30</sup> Ibid. h. 60

tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa inggris: beneficiaries) atau obyek saja.<sup>31</sup>

## 2. Model-Model Pemberdayaan

Model-model pemberdayaan ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan sosial yakni:

### 1. Politik

Demokratisasi adalah perubahan politik dari rezim otoritarian ke rezim demokratis, dan sekaligus sebagai tindakan atau gerakan bersama membangun demokrasi. Dalam konteks ini, pemberdayaan politik sangat terkait dengan demokratisasi sebagai

---

<sup>31</sup> [www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan\\_dan\\_transformasi\\_politik.pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf), akses pada tanggal 3 desember 2013

sebuah gerakan atau tindakan membangun demokrasi. Yaitu melambangkan demokrasi prosedural (kelembagaan dan aturan main) dan membangun demokrasi substantif baik budaya demokrasi (civic culture) maupun civil society sebagai sebuah idea. Demokrasi prosedural terkait dengan hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif; pola-pola penyelesaian ekstra perlementer; pemilihan umum, kepartaian, mekanisme pembuatan kebijakan, konstitusi dan lain-lain. Demokrasi substantif terkait dengan sikap dan perilaku demokrasi seperti toleransi, kebersamaan, partisipasi, kompetensi, civic engagement, solidaritas, trust, keterbukaan, kemitraan, anti diskriminasi.<sup>32</sup>

Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan keputusan untuk kepentingan umum. Kata “politik” mengandung pengertian publik. Secara historis, politik diartikan sebagai usaha membicarakan apa yang akan menjadi kebaikan bersama bagi para warga negara yang hidup dalam polis selain itu, dikemukakan politik merupakan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat.

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan

---

<sup>32</sup> Arief budiman, Pembangunan dan Lembaga swadaya Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 124



orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>33</sup>

Pemberdayaan masyarakat dan demokrasi sangat bergantung satu sama lain, karena dengan pemberdayaan masyarakat demokrasi dapat berjalan dengan baik, pemberdayaan baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang membawa masyarakat khususnya di Kota Makassar lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi.

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 118

mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.<sup>34</sup>

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>35</sup>

## 2. Ekonomi

Setiap individu masyarakat berupaya mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Dalam hal ini, terdapat kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi individu dan memenuhi kebutuhan nasional bagi masyarakat negara. Kegiatan ekonomi pada dasarnya berkisar pada kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.<sup>36</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus

---

<sup>34</sup> Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia 2008) h. 116

<sup>35</sup> Ibid 159

<sup>36</sup> Ramla Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia 1992), h. 206

dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isi strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka pendekatan friedman, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedman memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedman ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumber daya.<sup>37</sup>

### 3. Sosial

Pemberdayaan sosial adalah penguatan kapasitas (capacity building) para penerima pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan diri dalam memenuhi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau pelayanan sosial, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat secara mandiri.

Partisipasi sosial adalah penguatan kepedulian, inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segenap proses pembangunan kesejahteraan sosial beserta hasil-hasil yang dicapai.

---

<sup>37</sup> Ahmad Azizi Qadri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia* h. 39-40

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok didalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga, masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.<sup>38</sup>

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Buku maupun artikel mengenai PKS begitu banyak. Sebagian tertarik melihat aspek ideologis PKS, lainnya melihat perkembangan sejarah PKS dan prestasi gemilangnya pada pemilu 2004 dan 2009.

---

<sup>38</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, h. 147

Namun sedikit sekali karya ilmiah yang bersifat sistematis dalam meneliti perilaku politik PKS pasca pemilu 2009. Dari kepustakaan yang ada kita dapat menarik benang merah mengenai dua pendekatan dalam melihat PKS : *pertama*, kepustakaan yang ditulis oleh para jurnalis yang memakai pendekatan jurnalistik, *kedua*, kepustakaan yang ditulis oleh para peneliti atau sarjana yang memakai pendekatan akademis.

Baik menggunakan pendekatan jurnalisitik maupun akademik, ada tulisan atau karya yang bernada simpatik maupun kritis. Jurnalis-jurnalis barat kebanyakan bersikap kritis dan negative, seperti sadanaand Dhume dan Andrew steele. Mereka rajin menguliti agenda-agenda terselubung PKS yang secara konsisten mendorong penerapan hokum islam dalam berbagai segi kehidupan publik. Mereka secara sinis melihat PKS tak ubahnya kendaraan politik formal yang memiliki cita-cita fasis dan teokratik, namun berjuang melalui perangkat demokrasi formal.

Filosof Yunani Kuno yang membukukan buah pikirannya yang sangat dipengaruhi gurunya, Socrates (469-399)-- adalah Plato (429-347). Bukunya berjudul *Politea (Republik)* dan *Nomoi* (kitab hukum). Diikuti kemudian oleh Aristoteles (384-322), murid Plato. Tradisi kajian etika bernegara kemudian dilanjutkan baik oleh pemikir-pemikir dunia Barat maupun dunia Islam. Sejauh yang penulis ketahui, kajian berbentuk penelitian mengenai etika dan khususnya etika bernegara-- di Indonesia masih tergolong langka.

Suparman Syukur meneliti mengenai etika religius Abu Hasan al Mawardi dalam kitabnya *Adab al-Dunya wa al-Din*. Hasil penelitiannya ini kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul *Etika Religius*, pada tahun 2004.

Adapun mengenai PKS itu sendiri, terdapat beberapa penelitian. Aay Muhammad Furkon menerbitkan tesisnya dengan judul *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (2004).

Tesis lain yang disusun berdasarkan penelitian tentang PKS dilakukan oleh Nashir Fahmi, yang kemudian diterbitkan dengan judul buku *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS* (2006). Tesis ini membahas tentang bagaimana PKS memahami penerapan syariat Islam yang *kaffah* di satu sisi, dan realitas demokrasi di sisi lain.

Dengan kata lain, partai hanyalah kedok untuk mencapai tujuan akhir dan demokrasi akan dibajak oleh PKS jika suatu saat mereka mampu memperoleh dukungan dan kekuatan politik yang dominan. Dume melukiskan PKS sebagai gerakan gradual dan evolusioner untuk menegakkan Negara islam di Indonesia. Dilain sisi beberapa peneliti dan akademisi juga melihat PKS dengan nada dan konten yang kritis, namun dibingkai melalui pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis. Misalnyastudi Platzdasch yang meneliti sejarah dan perkembangan islamisme di Indonesia era pasca Soeharto.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang nampal dalam situasi yang diselidiki.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan (field research), yaitu suatu cara pendekatan dengan jalan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan sumber data, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data Primer antara lain: data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh partai keadilan sejahtera (PKS), serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks kehidupan berdemokrasi.

#### **b. Data Skunder**

Data skunder antara lain : data yang diperoleh melalui data-data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah maupun melalui media internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjukkan suatu data yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam bend, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dan lainnya. Dan peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

a. Wawancara

Yaitu proses tanya-jawab yang digunakan oleh penulis kepada anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di ada di Kota Makassar, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan hal yang diteliti.<sup>39</sup>

b. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, hal ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data skunder didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, foto, data statistik dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>39</sup> Metode Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijakan, ( Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h. 39



Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan pertimbangan, menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan yang dianggap mendasar dan universal.<sup>40</sup>

#### **G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi**

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis sengaja memberikan deskripsi pada tulisan ini, yang disusun berdasarkan urutan bab. Mulai dari bab I sampai dengan bab V yang secara umum dibagi sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya serta beberapa masalah pokok dalam skripsi ini. Oleh karena itu bagian pendahuluan dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca memasuki uraian-uraian selanjutnya tentang masalah-masalah yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini yang memuat diantaranya : latar belakang masalah, Rumusan dan batasan masalah, definisi demokrasi, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi acuan

---

<sup>40</sup> Burhan Bagin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) cet. Ket-3, h. 101

dalam penulisan skripsi ini. Bab ini juga merupakan sebuah pengantar pada inti pembahasan yang akan dikaji.

Bab II, berisi tentang sekilas tentang partai keadilan sejahtera (PKS) yang akan penulis kaji dan teliti yang sifatnya umum dan telah ada dan dipandang sesuai untuk dijadikan objek penelitian dilapangan pada pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Bab III, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian dilapangan dari penulis tentang eksistensi partai keadilan sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kota Makassar. Kemudian memuat hasil penafsiran dan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan hasil penelitian yang bersifat relevan untuk memberikan deskripsi tentang analisa penulis terhadap masalah.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan serta implikasi atau rekomendasi yang muncul berdasarkan penelitian dan seluruh uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini. Kemudian dalam bab ini juga dimuat pula implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi yang dipandang perlu, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis, berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas pada skripsi ini.

## **BAB II**

### **SEKILAS SEJARAH TENTANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

#### **A. Partai Keadilan Sejahtera**

##### **1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau langkah antisipasi yang diambil para aktifis dakwah yang ada di Partai Keadilan Sejahtera (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD kpta/kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan indonesia yang lebih baik dimasa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kadeer yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah terwujudnya Indonesia yang aadil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai.<sup>1</sup>

Problem pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electral therashold membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan

---

<sup>1</sup>[http:// www.Partaikeadilansejahtera.com](http://www.Partaikeadilansejahtera.com)

kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang ntuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.<sup>2</sup>

Partai ini berlambangkan dua bulan berwarna kunign emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hita dan dibawahnya terdapat tulisan “SEJAHTERA”. Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan Ka’bah, Kiblat suci kaum muslimin yang melambangkan kesatuan ummat. Partai ini memiliki karakteristik moralis, profesional, patriok demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional, kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerjasama Internasional.<sup>3</sup>

Adapun landasan partai ini adalah al-Qur’an yang meliputi surat al-Syura ayat 13:

---

<sup>2</sup> DPP PKS, *Sekilas Partai Keadilan*, hal. 25-26

<sup>3</sup> Ibid. hal. 40-41

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya : “Dia telah mensyari’atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepadalah Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadanya dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya yang kembali (kepada-Nya)”, al-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantaranya kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,

sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang fasik.”, al-Shaf: 10-13: “hai orang-orang yang beriman, kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang lebih baik didalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman”, dan al-An’am: 153: “Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa..<sup>4</sup> Dasar pemikiran Partai ii adalah symuliyat al-Islam (kesempurnaan Islam; Islam agama dan negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang mereffleksi keseluruhan sikap, perilaku dan aktifitasnya.

---

<sup>4</sup> Landasan al\_Qur’an tersebut adalah: QS, al-Syura: 13, QS, al-Nur: 55, QS, al-Shaff: 10-13, QS, al-An’am: 153

Para kader tersebut mempunyai militansi serta kesolidan yang tinggi baik itu secara personal, struktural maupun konsepsional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui para kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik yang jarang dilakukan oleh para politik lainnya, seperti memberikan pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat melalui aktivitas-aktivitas serta program-program yang digulirkan. Sehingga rakyat memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara dan menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahannya.<sup>5</sup>

## 2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setelah berganti nama dari Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka visi dan misi-nya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya.<sup>6</sup> Dan dengan visi dan misi baru ini

---

<sup>5</sup> Satria had lubis, yang nyata dari partai keadilan sejahtera 35 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung partai keadilan sejahtera. (Jakarta: Masyarakat publication, 2003) h. v-vi

<sup>6</sup> Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), partai menjabarkan visi-misinya dalam poin yang terdiri dari:

### Visi PK

1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan bangsa
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional
3. Menjadi pelopor pengembang kultur pelayan dalam tradisi politik Indonesia
4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia
5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia

### Misi PK

1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia
2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia
3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan dunia

nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal.

**Visi Umum :**

“sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa”<sup>7</sup>

**Visi Khusus**

“Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai :

1. Partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa diberbagai bidang
3. Kekuatan mempolopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang Rahmatan lil ‘alamin
4. Akselator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

**MISI**

1. Menyebarkan da’wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir

---

<sup>7</sup> Untung Wahono, dkk, *profil Singkat Partai Keadilan Sejahtera*, hal. 26



2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami diberbagai bidang sebagai markaz tghyir dan pusat solusi
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solukatif dan membawa rahmat
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayana dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unssur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihtatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk meperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi
7. Ikut meberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negri muslim yang tertindas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ramlan, Surbekti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992. hal.121

## **B. Transformasi Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera**

### **1. Transformasi Idiologi PK ke PKS di Kota Makassar**

Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam, namun dengan bergantinya zaman PKS banyak mengalami perubahan dimana dia lebih terbuka, baik dengan parpol maupun masyarakat sehingga lebih di kenal baik dari segi positif dan negatifnya. Tidak ada yang kebetulan, semuanya melalui proses. Hal itu ternyata memang benar, terbukti pada PKS. Sejak mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka, auranya menjadi hilang. Bersamaan dengan itu, perbedaan PKS dengan partai lainnya semakin tidak tampak. Padahal, perbedaan yang dulu ada itulah yang membuat PKS dicinta. Ghirah perjuangan sedikit demi sedikit menghilang

Hal yang sama terjadi ketika PK menjadi PKS pada tahun 2002, PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran serta manhaj perjuangan PK. Bahkan ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan

---

<sup>9</sup> M. Imdadun, Rahmat. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Perlemen*, Yogyakarta: Lkis 2008., h. 114

agenda Islami yang lebih nyata dan artikulatif.<sup>9</sup> Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam. Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa, sebagaimana maksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuannya. Masyarakat madani yang adil sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk direfensiasi dan sekaligus positiong PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Disisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara baik dengan akhlak yang terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.<sup>11</sup>

## **2. Transformasi kelembagaan PK ke PKS di kota makassar**

Awal terbentuknya Partai Keadilan diprakarsai oleh para aktivis dakwah kampus. Para aktivis yang sebagian besar berusia muda tersebut

---

<sup>10</sup> Anggaran Dasar PKS pasal 5

<sup>11</sup> MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat Foam PKS, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1, h. 32-33

bergerak dari dalam kampus dan juga ke sekolah-sekolah. Di kampus mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga inilah yang menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, baik yang berupa pengajian-pengajian untuk mahasiswa, maupun pengajaran islam bagi para anggotanya. Di sekolah-sekolah, para aktivis ini berkiprah melalui lembaga kesiswaan yang sering disebut Rohani Islam (ROHIS). Kegiatan yang dilakukan di ROHIS sama dengan LDK, yakni memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman semangat (*ghirah*) keislaman. Pada kondisi ini nampak jelas usaha para aktivis muda islam untuk menunjukkan arah perjuangan islam dan memperlihatkan eksistensi Islam dalam segala aspek kehidupan.

Kegiatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada masa-masa awal (era pertengahan tahun 1970-an hingga 1980-an) tersebut dilakukan secara diam-diam jika menyelenggarakan pengajian untuk banyak orang, mereka mengatasnamakan kegiatan mahasiswa atau siswa. Hal ini dilakukan tetap menjalankan kegiatan dakwah walaupun pada saat itu aktivitas dan kegiatan keagamaan sepertinya dibatasi oleh pemerintah, hal ini tidak mengurangi semangat berdakwah para aktivis Islam. Kegiatan ini dikenal dengan nama “*Usroh*” yang berarti keluarga. Metode pengajian yang cenderung sembunyi-sembunyi ini tidak terlepas dari kebijakan politik

pemerintahan Orde Baru yang sangat represif terhadap gerakan keagamaan.

Ketika memasuki era 1990-an dimana mulai muncul pergeseran politik ketika Soeharto mulai menempatkan aktivis Islam sebagai sekutu. Dalam kondisi seperti ini, para aktivis LDK lebih leluasa melakukan dakwahnya dan mendapatkan sambutan yang lebih leluasa. Pada era ini, mereka tidak lagi menggunakan sebutan *Usroh*, tetapi mengubahnya menjadi *Ikhwan* dan menamai aktivitas mereka dengan sebutan *Tarbiyah* (pendidikan). Perubahan nama ini dimaksudkan untuk membedakan diri dari organisasi lain dalam dakwah kampus.

Gerakan Tarbiyah terdiri dari lima elemen penting: *pertama*, DDII yang merupakan transformasi dari Masyumi dengan tokoh utamanya adalah Mohammad Natsir. *Kedua*, elemen jaringan dakwah kampus (LDK) sebagai tulang punggung Tarbiyah dan sekolah (ROHIS). *Ketiga*, elemen para alumnus perguruan tinggi luar negeri, khususnya Timur Tengah. *Keempat*: para aktivis ormas islam maupun kepemudaan islam. *Kelima*, para da'i lulusan pesantren.

Dalam pergerakannya kelima elemen tersebut bergerak bersama-sama, saling mendukung dan menguatkan dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Kombinasi kerja yang kompak dari lima elemen utama Tarbiyah, menghasilkan pertumbuhan jaringan dakwah yang makin lama

makin cepat. Dilihat dari pertumbuhannya, perkembangan anggota dan persebarannya menunjukkan tingkat akselerasi yang mengagumkan.

Dari perjalanan kegiatan dakwah yang telah dibangun oleh aktivis islam sejak awal bisa kita lihat bahwa Islam menjadi asas perjuangan para kader dalam berdakwah. Islam dalam gerakan dakwah menjadi sebuah sistem pembenaran, dari gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa pada saat itu. Hal ini kemudian menjadi satu kepercayaan yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para aktivis dakwah dalam totalitas kehidupan, khususnya dalam jagad sosial-politik pada saat itu. Inilah yang dinamakan ideologi. Kesamaan ideologi Islam menjadikan para kader dari kelima elemen yang bersatu dalam satu tujuan kemudian menjadi sebuah awal pemikiran kader-kader tarbiyah untuk membentuk sebuah partai politik.

Dari kesamaan ideologi para kader-kader tarbiyah maka sekitar awal tahun 1998, tepatnya 20 Juli 1998, kader-kader gerakan tarbiyah mendirikan partai politik Islam yaitu Partai Keadilan (PK). Sebuah partai Islam dengan pemikiran baru, berbeda dengan partai Islam lainnya dan memiliki kader yang pekembangannya semakin baik. Dalam waktu yang relatif singkat, PK berhasil mengembangkan kepengurusan partai dan memenuhi persyaratan mengikuti pemilu pertama pada tahun 1999. Pada pemilu ini PK berhasil menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari

total keseluruhan jumlah suara. Dari pencapaian PK ini, tujuh orang wakil PK duduk di DPR pusat.<sup>12</sup> Hal ini menjadi sebuah awal yang menjadi bukti keberhasilan para kader-kader Partai Keadilan yang semakin memperlihatkan eksistensi perjuangan dakwah dan berhasil menghimpun suara dengan baik.

Pada perkembangan berikutnya, para kader PK terus membenahi dan memperkuat dirinya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pencapaian pada pemilu 1999 tidak memungkinkan bagi sustansibilitas partai ini. Ketentuan *electoral threshold* mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Hal ini didasarkan pada UU Pemilu tahun 1999, bab VII, pasal 39 mengenai syarat dan ketentuan keikutsertaan dalam pemilu, Partai Keadilan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum 2004, kecuali jika PK mau bergabung dengan partai lainnya, atau mendirikan partai politik baru.

Langkah antisipasi awal yang kemudian ditempuh oleh PK untuk mengikuti pemilu 2004 yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali mengenai *electoral threshold*. PK juga mempersiapkan partai baru, jika gagal dalam memperjuangkan pengurangan batas ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah rapat pleno tahun 2001 dicari cara lain untuk meneruskan dakwah melalui jalur politik. Dalam rapat tersebut, muncul

---

<sup>12</sup> Ideologi Politik PKS “Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen”, Hal.34

dua gagasan: *pertama*, pendapat agar PK menjadi organisasi massa. *Kedua*, pendapat yang menginginkan membuat partai baru yang simbolnya tak jauh berbeda dengan Partai Keadilan. Pendapat kedua inilah yang akhirnya dipilih pada saat itu.<sup>13</sup>

Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan kepada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf. Dalam berbagai rapat, disepakati untuk menambahkan kata “Sejahtera” sebagai nama partai baru tersebut. Jadi, jika digabung dengan nama Partai Keadilan akan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tambahan ini dipilih dengan mempertimbangkan filosofis bahwa partai baru yang akan lahir tidak semata-mata menekankan pada perjuangan menegakkan keadilan dalam ranah hukum pada tingkat politik, tetapi juga menyelesaikan persoalan tentang belum tercapainya kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah.<sup>14</sup>

PKS secara resmi berdiri pada 20 April 2002, sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan mengenai *electoral threshold*. Dengan demikian maka visi dan misi partai tidak bergeser dari khittah PK dan walaupun ada perbedaannya hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata. Atas dasar kesamaan visi dan misi tersebut, musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke-XIII yang berlangsung di Wisma Haji,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



Bekasi, Jawa Barat, pada 17 April 2003, memustuskan Partai Keadilan menggabungkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera.<sup>15</sup>

Sejatinya, perubahan PK ke PKS hanyalah semata-mata perubahan nama untuk menyiasati agar bisa mengikuti pemilu 2004. Oleh karena itu, suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep partai), maupun infrastruktur PKS (baik berupa jaringan kader, kepengurusan, hingga aset-aset partai) adalah pelimpahan dari PK. Hal ini dipertegas oleh H.Andi Akmal Pasluddin,

“Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader yang menjadikan islam sebagai ideologi politik partai, aktifitas dan konsep kepartaian masih sama seperti dulu saat bernama Partai Keadilan. Yang berubah hanya nama saja dan orang-orang yang terlibat didalamnya tentunya berbeda dari yang dulu.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara penulis beranggapan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera menjadi penerus perjuangan Partai Keadilan. Aktiftas yang dilakukan sejak berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Partai Keadilan. Hanya saja PKS mengubah strategi dengan menampilkan citra yang lebih inklusif dengan mengangkat isu-isu yang relevan bagi seluruh elemen masyarakat. Ini ditempuh dengan harapan PKS mampu menjaring pemilih seluas-luasnya, tidak terbatas hanya pada kalangan kader tarbiyah saja.

---

<sup>15</sup> Ideologi Politik PKS, Hal.38

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Prov.SUL-SEL, di Ruang wakil ketua DPRD Prov.Sul-Sel pada hari selasa, tanggal 11 Februari 2014 Pkl.11.00 WITA,

Dari penjelasan diatas penulis melihat arah perjuangan Partai Keadilan yang telah bertransformasi kedalam Partai Keadilan Sejahtera masih tetap sama, yaitu memperjuangkan Islam dalam totalitas kehidupan berbangsa. Partai yang dalam tipologi partai politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti termasuk dalam tipologi Partai Kader sesuai komposisi dan jumlah anggotanya, hingga saat ini masih menjadikan anggota sebagai sumber kekuatan utama partai Keadilan Sejahtera.

Meski telah bertransformasi menjadi PKS, metode pembinaan yang digunakan PKS tetap mengacu pada sistem pengkaderan dakwah tarbiyah yang dibawah dari PK. Ada berbagai pihak menilai, kuatnya penguasaan gerakan tarbiyah terhadap lembaga dakwah formal kampus-kampus dan sekolah-sekolah ini telah memberikan keuntungan politik berupa dukungan para aktivis dakwah terhadap Partai Keadilan Sejahtera.

Hal ini pun diakui oleh H. Andi Akmal Pasluddin, SP.,MM ;

“Mencermati dan menganalisa munculnya gerakan-gerakan Tarbiyah dan peranannya dalam perpolitikan nasional bukanlah hal yang mudah. Salah satu sebabnya adalah gerakan yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an ini hingga berubah menjadi kekuatan nasional yang diperhitungkan- dirintis oleh pioner-pioner yang bukanlah merupakan figur-figur yang sebelumnya dikenal publik secara luas. Mereka itu tidak lain hanyalah anak-anak muda biasa yang berkeinginan untuk mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama yang universal dan menyeluruh dengan sedikit upaya untuk memperluas kesadaran keagamaan itu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Prov.SUL-SEL, di Ruang wakil ketua DPRD Prov.Sul-Sel pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2011 Pkl.11.00 WITA

Terkait dengan partai politik, kegiatan tarbiyah sebagai kegiatan dakwah PKS, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya.

Eksistensi Partai Kader ini diperlihatkan dalam proses kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh PKS yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan/Daurah. Dari berbagai jenis daurah tarbiyah (sarana untuk membekali peserta tarbiyah dengan pengalaman untuk pengembangan keahlian dan pengetahuan), terdapat daurah yang merupakan kegiatan sosial-politik misalnya daurah penyelenggaraan/ pengawasan pemilu dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Badan Desa, LSM).<sup>18</sup>

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan

---

<sup>18</sup> Tim Kaderisasi 2004

sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai.

Perekrutan dan pengkaderan PKS yang tetap mengandalkan gerakan Tarbiyah ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Jika pada awal terbentuknya (1998) partai ini baru memiliki kader 42.202 orang maka pada 2004 pertumbuhan kader (inti maupun pendukung) berjumlah 394.190 orang. Artinya pertumbuhan kader yang dibangun selama lima tahun mencapai 834 persen.<sup>19</sup>

Dari data tersebut penulis berpendapat bahwa pertumbuhan kader yang dibangun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan kualitas Partai Keadilan Sejahtera yang semakin kuat dengan kader yang dibina. Capaian itu menjadikan eksistensi PKS makin mendapat tempat dalam peta politik Indonesia.

Dari perjalanan pengkaderan yang tidak singkat itulah kemudian membentuk pribadi-pribadi para kader PKS sebagai pribadi yang sangat patuh dan taat bukan hanya kepada Tuhannya tetapi juga kepada para pemimpin partainya selama instruksi yang diberikan adalah selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang jadi pedomannya.

Salah satu keberhasilan tarbiyah yang dilakukan PKS terhadap kadernya sehingga menjadi taat secara total adalah pengambilalihan peran pendanaan partai yang biasanya oleh kaum kapitalis, bagi PKS menjadi tanggung jawab seluruh

---

<sup>19</sup> Reform Institue, *Studi Monografi Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Hal 80-81

kader partai. Gerakan Lima Ribu Rupiah (GALIBU) dari para kader untuk mendanai aktifitas partai dapat diciptakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS. Dalam konteks Indonesia yang dilanda krisis ekonomi gerakan GALIBU adalah indikasi militansi kader partai terhadap partainya. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai berbagai gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh kader-kader PKS beserta para relawannya, seperti menerjunkan relawan ke daerah-daerah bencana, mengirimkan bantuan-bantuan sosial, mengadakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat, merupakan bentuk penetrasi politis kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjadi pengurus DPW PKS Prov.Sul-Sel, yakni saudara Mahmuddin S.Sos bahwa;

“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Dakwah yang dalam aktivitas kesehariannya diupayakan selalu berada di jalan dakwah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat mendekati pemilu saja (seperti kebanyakan yang dilakukan oleh partai-partai lain), tidak mencari keuntungan politik semata, tapi untuk kepentingan masyarakat.”<sup>20</sup>

Dari pernyataan tersebut penulis beranggapan bahwa PKS berhasil membentuk kader-kadernya menjadi kader militan, intelektual tetapi berkarakter santun sehingga dapat diterima sebagian besar masyarakat sehingga akhirnya mampu mempertahankan keberadaan partainya dan dalam kurun waktu yang cukup singkat, hanya dalam 3 kali periode pemilu, PKS sudah mampu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan saudara Mahmuddin, S.Sos, di kantor DPW PKS Prov.Sulawesi Selatan, Rabu 12 Februari 2014.

membuktikan kekuatan politik dan gerakannya, dengan menempatkan dirinya berada pada jajaran elit partai-partai yang lebih mapan dari segi pengalaman, kekuatan dana dan dukungan basis massa Islam yang lebih tersebar merata dan tradisional.

Dalam landasan filosofis Partai Keadilan Sejahtera itu, terdapat penegasan bahwa Islam merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun strategi-strategi cerdas perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.<sup>21</sup>

Islam dalam konsepsi para aktivis PK tergambar dalam statemen berikut :

“Islam adalah sistem yang hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar. Keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara dan masyarakat.”<sup>22</sup>

Dari pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Islam dalam konsepsi para aktivis Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air,

---

<sup>21</sup> Aay Muhammad Furqon, *Partai Keadilan Sejahtera*, hlm.124

<sup>22</sup> PK dalam Landasan filosofis, dalam *buku Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera*. hal.113

pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar.

Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai ini mencanangkan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain PK lahir untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam.

Hal yang sama juga terjadi saat PK berubah nama menjadi PKS pada tahun 2002. PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran, serta dasar perjuangan PK. PKS sebagai partai dakwah menjadikan Islam sebagai ideologinya.<sup>23</sup> Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Islam bukan hanya sebagai agama namun juga sebagai ideologi. Ideologi inilah yang memuat suatu kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama jagad sosial politik. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan yang diyakini mampu menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi yang mengajarkan bahwa Islam dapat dijadikan pijakan

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Prov.SUL-SEL, di Ruang wakil ketua DPRD Prov.Sul-Sel pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Pkl.11.00 WITA

dalam aktivitas politik yang menyediakan kejelasan arah bagi manusia, mendorong, pembenaran dan dasar bagi aktivitas untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya. Dalam wawancara dengan H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM, beliau menegaskan;<sup>24</sup>

“Setiap muslim berkewajiban untuk menciptakan tatanan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Islam dipahami sebagai agama (*Ad-din*) yaitu tuntunan kehidupan dan penyerahan diri hanya pada Allah SWT; dan juga sebagai negara (*ad-daulah*) yaitu sebuah tata aturan mengelola kehidupan dalam konteks kekuasaan.”

Dari wawancara diatas penulis berpendapat bahwa Partai Keadilan Sejahtera memandang Islam bukan hanya sebagai agama namun juga sebagai ideologi. Ideologi inilah yang memuat suatu kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama jagad sosial politik. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan yang diyakini mampu menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi yang mengajarkan bahwa Islam dapat dijadikan pijakan dalam aktivitas politik yang menyediakan kejelasan arah bagi manusia, mendorong, pembenaran dan dasar bagi aktivitas untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya.

Melihat kebijakan dasar yang dirumuskan PKS sebagaimana tersebut diatas, penulis melihat tampak jelas adanya semangat yang kuat untuk menjadikan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ketua Umum DPW PKS Prov.SUL-SEL, di Ruang wakil ketua DPRD Prov.Sul-Sel pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2011 Pkl.11.00 WITA



Islam sebagai dasar filosofis, sumber ide, landasan nilai, perspektif berfikir, serta acuan pembuatan sistem dan aturan dalam rangka menyelesaikan masalah bangsa dan negara.

Dari analisis diatas, jika dikaitkan dengan konsep tipologi partai politik berdasarkan Asas dan Orientasinya, menurut Ramlan Surbakti, penulismenggolongkan PKS sebagai Partai Politik Doktriner.<sup>25</sup> Dimana PKS dengan jelas menunjukkan jati dirinya sebagai Partai Islam dan memiliki sejumlah agenda kegiatan yang kongkrit sebagai wujud penjabaran ideologi Islam yang didoktrinasikannya.

#### 1. Bidang Politik

- a. Mempolopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi
- b. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (bersih, peduli, dan profesional)
- c. Mendorong dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar menjadi proses saling mengawasi demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil
- d. Memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi penghargaan, serta penataan jumlah pegawai dan memfokuskan pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efesien
- e. Strategi penegakkan hukum diawali dengan membersihkan alat penegangnya dari perilaku bermasalah dan konflik serta penguatan kapasitas kelembagaan

---

<sup>25</sup> Ramlan surbakti, memahami Ilmu politik hal.121

- f. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru
  - g. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan politik selaku penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat
  - h. Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaan.<sup>26</sup>
2. Bidang Ekonomi
- a. Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rante ekonomi
  - b. Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilitas nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
  - c. Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan otonomi nasional.
  - d. Ekonomi syariah merencanakan peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan instansi zakat dan wakaf yang kokoh sebagaimana integral dari sistem fiskal nasional.<sup>27</sup>
3. Bidang Sosial Budaya
- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional
  - b. Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan kelanjutan
  - c. Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral serta

---

<sup>26</sup> MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h. 45

<sup>27</sup> Ibid h. 34

- menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa
- d. Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, dan berdaya melalui pemantapan peran disektor domestik dan publik.<sup>28</sup>

### 3. Transformasi jaringan dan strategi PKS di kota makassar

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth'aridhah) dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (strategi mobilitas horizontal/ta'biah al-afaqiyah) dan gerakan struktural (strategi mobilitas vertikal/ta'biah al-amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (Central Board) yang berpusat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 98 D-F, Jakarta, yang dikelola secara full-time. Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (District Board) yang mengelola wilayah setingkat provinsi dan kota/kabupaten. Sedangkan mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi

---

<sup>28</sup> Ibid h. 15-20

mashidirulqarar (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik.<sup>29</sup>

PKS adalah menyebut dirinya sebagai partai dakwah karena politik adalah salah satu bagian dari dakwah meskipun Islam bisa saja didiversifikasikan kedalam kegiatan politik, apa yang dilakukan kalangan aktivis dakwah kampus, yang melahirkan PKS. PKS juga hendak dilihat sebagai suatu eksperimen tentu, dalam hal pandangan bahwa politik termasuk bagian dari dakwah Islam PKS, tidak bisa disebut pemula.<sup>30</sup>

Gerakan kultural, (Strategi Mobilitas Horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan, ormas, dan berbagai organisasi lainnya.. melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader PKS akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan

---

<sup>29</sup> Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 37

<sup>30</sup> Aay Muhammaad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: ideologi dan praktis politik kaum muda muslim indonesia kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004), h. 67

dan sebagainya. Karena dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama rakyat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah keberbagai klangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat, sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan masyarakat kepada partai dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

Gerakan struktural adalah penyebaran kader kedalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin bangsa. Melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan secara struktur dan top-down digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawalan pembangunan bangsa. PKS dalam menjalankan gerakan gerakan struktural dengan dasar kesamaan falsafah atau platform, dimungkinkan terbangunnya strategi partnership antara partai dakwah

dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan, sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghalalkan kebijakan yang membela rakyat.<sup>31</sup>

Grand strategi transformasi bangsa yang disusun PKS ini tidak lain dari kombinasi antara perubahan yang bersifat bottom up dengan bottom down yang merupakan ciri khas PKS sebagai partai dakwah. Grand strategi transformasi bangsa ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan LSM/sektor lain). Yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi. Dengan kekuatan integritas moral religius dan kualitas profesional. PKS sebagai partai dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang, berfungsi mendukung, memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.<sup>32</sup>

### **C. Berdirinya PKS di Sul-Sel dan kota Makassar**

Keberadaan kepengurusan PKS di Provinsi Sul-Sel sudah ada sejak partai ini bernama Partai Keadilan (PK). Ketua DPW yang pertama ialah Surya Darma yang menjabat hanya setahun, dilanjutkan oleh Qayyim Murnarka untuk periode 1999- 2004 dan Najamuddin Mara untuk periode 2004-2010. Sekarang ini PKS Sul-Sel dipimpin

---

<sup>31</sup> Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, h. 40

<sup>32</sup> Alai Said Danamik, *Fenomena PKS: Transformasi 20 tahun, gerakan arabiyah di Indonesia*, h. Xxix.

oleh Akmal Pasluddin yang dipercaya untuk periode 2010-2015. Dengan sistem kaderisasi yang bagus, PKS Sul-sel mampu mengantarkan kader terbaiknya seperti Andi Rahmat dan Anis Matta melenggang ke Jakarta. Andi Rahmat saat ini menjadi anggota DPR di komisi hukum, sedangkan Anis Matta menduduki posisi puncak dalam PKS sebagai presiden Partai menggantikan Lutfi Hasan Ishak.

Perkembangan PKS di Sul-sel khususnya kota Makassar cukup pesat. Ditandai dengan dua hal, pertama menjamurnya institusi pendidikan islam seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Rumah Tahfidz Qur'an, lembaga zakat dan sekolah tinggi agama islam (STAI) misalnya STAI AL-AZHAR yang di kelola oleh salah satu kader inti PKS Makassar. Menurut sekretaris MPW PKS sul-sel, Muhammad Taslim meskipun di kelola kader sendiri, tetapi STAI AL\_AZHAR sifatnya independen dan tidak dibawa naungan PKS. Kedua, masifnya aksi kolektif yang dilakukan kader- kader PKS di Makassar seperti workshop aksi-aksi social terhadap masyarakat kota Makassar

#### **D. Struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS kota Makassar**

Adapun Susunan Dewan Pengurus Daerah PKS kota Makassar periode 2012 – 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Hasan Hamido S.Pd., M.Si	Ketua Umum
Tumaruddin, S.Si, Apt	Wakil Ketua Umum
Mudzakkir Ali Djamil, ST	Sekretaris Umum
Edi, ST	Wakil Sekretaris Umum I
Mustain Ruddin, A.Md	Wakil Sekretaris Umum II
Munawir	Wakil Sekretaris Umum III
Hamsah, ST	Bendahara Umum

No	Bidang-Bidang	Nama	Jabatan	No	Bidang-bidang	Nama	jabatan
1.	Pembinaan Cabang Dakwah I (Kec. Makassar, Ujung Pandang, Rappocini )	Awaluddin Arsyad,A.Md	Ketua	5.	Bidang Pembinaan Cabang Dakwah V ( Kec. Tamalanrea, Biringkanaya )	Sutikno Kasim, A.Md	Ketua
2.	Bidang Pembinaan Cabang Dakwah II ( Kec. Tamalate, Mamajang, Mariso )	Tumaruddin	Ketua	6.	Bidang Kaderisasi	Drs.Ruangsah Irwan Waji A Harianto Malik Abd Azis Fathullah	Ketua  Anggota Anggota Anggota
3.	Bidang Pembinaan Cabang Dakwah III ( Kec. Panakukan, Manggala )	Hamsah, ST	Ketua	7.	Bidang Pembangunan Keummatan	H.M. Iqbal Abd. DjaliLc Andi Hadi Ibrahim, S.S, MA Hj. Aida M Siri Ammar Munir, Lc, M. Th.i Ahmad Rasyid, S.Ag	Ketua  Anggota  Anggota  Anggota a Anggota
4.	Bidang Pembinaan Cabang Dakwah IV ( Kec. Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah	Zainuddin	Ketua	8.	Bidang Kepanduan dan Olahraga	Wahyuddin Hasrullah Jumainah Adzaninah	Ketua Anggota Anggota

Sumber : dari DPC PKS Kota Makassar



## **E. Dinamika Politik PKS di Kota Makassar.**

Sejak awal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupan. Begitupun PKS di kota Makassar ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam. Hal yang sama terjadi ketika PK menjadi PKS pada tahun 2002, PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran serta manhaj perjuangan PK. Bahkan ketika telah menjaadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islami yang lebih nyata dan artikulatif.<sup>33</sup> Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam. Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa, sebagaimana maksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

. Beberapa respon secara nyata yang telah dilakukan oleh PKS demi merealisasikan tujuannya misalkan polemik hak angket reklamasi di Kota Makassar. Ini senada dengan yang diungkap oleh Mudzakkir menyatakan:

---

<sup>33</sup> M. Imadadun rahmat, Ideologi PKS, h. 114

<sup>34</sup> Anggaran Dasar PKS pasal 5

“mendukung penggunaan hak angket jika dasar yang digunakan memiliki bukti kuat atas pelanggaran dalam kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait proyek reklamasi yang dikerjasamakan pihak ketiga tersebut”<sup>35</sup>

Menurut analisa penulis mengenai polemik hak angket reklamasi di Kota Makassar yang meliputi di wilayah kecamatan Mariso, Tamalate, dan Bringkanaya sepanjang 35 km masih dalam tahap proses. Sikap PKS sangat jelas bahwa PKS akan mempelajari dulu untuk mengambil sikap dan tindakan agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Respon masyarakat yang positif terhadap PKS di kota Makassar sebagai partai dakwah baru sebatas potensi, ketika dikelola dengan baik maka ia akan menjadi kekuatan. Seluruh potensi harus dikembangkan dan dikelola sedemikian rupa, sehingga potensi tersebut menjadi sarana yang dapat digunakan sebagai Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kehidupan yang layak.



---

<sup>35</sup> Wawancara di DPRD Kota Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2013  
PKI.11.30 WITA

**BAB III**

**EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

**DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN**

**BERDEMOKRASI DI KOTA MAKASSAR**

**A. PKS Dalam Reproduksi Kader Politik**

**1. Menyiapkan Kader Politik Handal**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah keberbagai kalangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat, sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi startegis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan masyarakat kepada partai dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat. Gerakan struktural adalah penyebaran kader kedalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin bangsa. Melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan secara struktur dan top-down digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawan pembangunan bangsa. PKS dalam menjalankan gerakan gerakan struktural dengan dasar kesamaan falsafah atau plat form, dimungkinkan

terbangunnya strategi partnership antara partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan, sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghalalkan kebijakan yang membela rakyat.<sup>1</sup>

Dalam mendorong partipasi politik masyarakat kota makassar PKS yang berdasarkan secara islami yang dianut dan selalu melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi yang bertujuan untuk menumbuhkan kader yang mampu menjadi pemimpin yang kuat untuk masa depan. Menyiapkan generasi/kader politik yaitu pemuda masa depan, mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian dan intelektulitas, bersih peduli dan profesional. Untuk mencapai tujuan maupun orientasinya Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi amat kompleks akibat tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itulah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan akan lebih dituntut meningkatkan kualitas kaderisasi terutama untuk mengembangkan kader yang berkualitas, berakhlak, dan bermoral. Kader yang disatu sisi secara intens terlibat dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, di sisi lain juga mampu mengelola dan mengembangkan partainya secara profesional untuk menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik.

---

<sup>1</sup> Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 40

## **2. Pembentukan Jaringan Politik PKS.**

### **a. Liqo'**

Liqo' dilaksanakan berjenjang dan membentuk sel-sel, seperti jaringan telepon seluler atau bisnis MLM. Ada mad'u (murid/yunior) dan murabbi (guru/senior), setiap mad'u menjadi murabbi pada Liqa lain level bawahnya. Alumni punya mad'u beberapa mahasiswa, mahasiswa tingkat 3 punya mad'u bbrp mhs tingkat 1, mahasiswa tingkat 1 punya mad'u beberapa siswa ditempat SMA dia. Dan setiap anggota "Liqo" tidak diperkenankan pindah2 "Liqo" tempat "Liqo" lain tanpa ijin.

Liqo itu sendiri tidak bertujuan mencetak ahli syariah, tetapi lebih kepada membentuk wawasan dan kepribadian yang Islami, dengan visi dan pemahaman (madzab) agama sesuai dengan si empunya kader (dalam hal ini PKS). Pengajian Liqo pada dasarnya sama dengan pengajian lainnya, bedanya adalah di liqo ada acara share, bicara keakraban. Juga muatan materi dan misi yang dibawa dari pengajian tersebut. Muatan liqo bisa dikatakan syumul (menyeluruh), bukan hanya kajian2 tentang syariah, akidah, akhlak, tapi juga muamalah, politik bahkan ekonomi jadi agenda juga. Materi dibuat terstruktur berjenjang. (Materi2 dapat dilihat diberbagai halaman web site).

Dalam liqo aktifitas murid (ibadah, akhlak) itu menjadi pantauan dari ustadz. Murid tidak dilepas begitu saja. Sepekan

sekali amalan-amalan yg dikerjakan murid jadi bahan renungan dan evaluasi bersama bagi para peserta liqo yg lainnya. Dengan demikian ikatan batin antar para peserta dalam satu liqo lebih dekat, demikian juga antara murrobi dan mutarabi yang sangat erat. Inilah yang membedakan dengan pengajian-pengajian lainnya.

Tambahan, sistem Liqo ini tidak membedakan jenis kelamin, cuma tempat liqo laki-laki berbeda dengan perempuan. Sistem sel menyebabkan kadang antar kader junior tidak kenal sama lain, karena waktu atau tempat liqonya berbeda.

Kemudian selain itu, dalam masalah keilmuan, PKS mengasah kadernya melalui program tatsqif, yaitu taklim umum yang biasanya diisi oleh ustadz yang punya keilmuan yang dalam. Inilah untuk para murrobi, dan kader yang lebih senior. Program tatsqif ini pun dilakukan 2 minggu sekali, sebulan sekali, tergantung penyelenggara. Dengan demikian para murobbi pun ditingkatkan untuk menimba ilmu lebih luas lagi seperti mengikut tatsqif, mabit, dll.

#### b. Tarbiyah

Dari perjalanan pengkaderan yang membentuk pribadi-pribadi para kader PKS sebagai pribadi yang sangat patuh dan taat bukan hanya kepada Tuhannya tetapi juga kepada para pemimpin partainya selama instruksi yang diberikan adalah selaras dengan Al-Qur`an dan

Sunnah yang jadi pedomannya. Hal ini dapat dibuktikan ketika PKS mengadakan aksi sejuta umat, sebuah aksi demonstrasi yang mengagumkan. Unjuk rasa yang bukan hanya diikuti oleh orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja bahkan terdapat juga ibu-ibu yang menggendong anaknya atau mendorong kereta bayinya. Keberanian mereka berdemonstrasi sambil membawa bayinya, di antara ratusan ribu orang di Bundaran Hotel Indonesia, jelas menunjukkan tingginya jaminan dan kepercayaan bahwa unjuk rasa itu akan berlangsung tertib dan damai.

Salah satu keberhasilan tarbiyah yang dilakukan PKS terhadap kadernya sehingga menjadi taat secara total adalah pengambilalihan peran pendanaan partai yang biasanya oleh kaum kapitalis, bagi PKS menjadi tanggung jawab seluruh kader partai. Gerakan Lima Ribu Rupiah (GALIBU) dari para kader untuk mendanai aktifitas partai dapat diciptakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS. Dalam konteks Indonesia yang dilanda krisis ekonomi gerakan GALIBU adalah indikasi militansi kader partai terhadap partainya. Serta berbagai gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh kader-kader PKS beserta para relawannya, seperti menerjunkan relawan ke daerah-daerah bencana, mengirimkan bantuan-bantuan sosial, mengadakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat, merupakan bentuk penetrasi politis kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan-

kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat mendekati pemilu saja (seperti kebanyakan yang dilakukan oleh partai-partai lain), sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa berubah fungsi sebagai investasi politik PKS pada saat menghadapi pemilu.

Sedangkan prinsip egalitarianism tidaklah dijumpai dalam PKS kecuali dalam kaitannya dengan kepemimpinan yaitu bahwa setiap anggota mempunyai hak yang setara untuk menjadi pemimpin walaupun dalam praktiknya setiap calon pemimpin harus memenuhi syarat dan kriteria-kriteria tertentu serta harus disepakati oleh Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi di PKS.

Analisa tersebut di atas menunjukkan bahwa PKS dengan metode tarbiyah yang diterapkan untuk membina para kadernya menghasilkan sikap keberagamaan yang total. Tidak selamanya sikap taat secara total itu negatif selama diciptakan keseimbangan berfikir yang rasional dan irrasional. Hal ini dibuktikan oleh PKS yang berhasil membentuk kader-kadernya menjadi kader militan, intelektual tetapi berkarakter santun sehingga dapat diterima sebagian besar masyarakat sehingga akhirnya mampu mempertahankan keberadaan partainya dan dalam kurun waktu yang cukup singkat, hanya dalam 3 kali periode pemilu (kurang lebih 15 tahun), PKS sudah mampu membuktikan kekuatan politik dan gerakannya, dengan menempatkan dirinya berada pada jajaran elit partai-partai yang lebih



mapan dari segi pengalaman, kekuatan dana dan dukungan basis massa yang lebih tersebar merata dan tradisional.

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dalam setiap kegiatannya PKS memerlukan tenaga-tenaga yang terlatih. Untuk itu PKS melakukan pembinaan pada setiap kadernya. Mengenai hal ini, diungkapkan oleh salah satu kader yaitu Muttaqien Yunus,S.ST:

“...Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen politik. Hal ini hampir dijalankan oleh hampir semua parpol. Emm.. Akan tetapi, kebanyakan parpol membiarkan begitu saja kader dan anggotanya yang telah direkrut itu tanpa ada pembinaan yang memadai kepada mereka. Padahal, partai manapun memerlukan agen-agen penggerak untuk menjalankan roda kepartaian dan memperjuangkan tujuan-tujuan yang telah dicanangkannya sehingga seharusnya parpol melakukan proses character building (pembinaan karakter) secara intensif, tertata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, parpol tersebut akan dapat melahirkan kader yang sesuai dengan kepribadian politik dan jati diri partainya. Di samping itu, parpol tersebut memungkinkan memiliki kader yang memiliki standar-standar nilai, prinsip-prinsip, dan garis perjuangan yang relatif sama serta solid dalam bekerja sama dalam bingkai konstitusi partai yang telah disepakati. Insyaallah PKS melakukan pembinaan terhadap para kadernya..”<sup>2</sup>

Melalui kegiatan ini, membentuk kader PKS dengan pola pikir dan tindakan yang islami. Pada saat berinteraksi dapat diandalkan dan menjadi daya tarik dalam masyarakat.

#### c. KAMMI

Berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto pada tahun 1998 membuat ruang bagi aktivis politik islam kembali terbuka lebar. Selumlah alumni timur tengah membuat halaqoh tarbiyah di kampus-kampus. Saat gelombang reformasi muncul, timbul ide dari beberapa pimpinan untuk

---

<sup>2</sup> Wawancara di DPW.PKS Sul-sel pada hari jum'at, tanggal 7 Maret 2014 Pkl.15.00  
WITA

mendirikan partai politik. Ada 12 anggota majelis syuro yang waktu terlibat, antara lain Hilmi Aminuddin, Salim Segaf Al Jufri, Abdul Sakur, dan Yusuf Supendi, dan pada tanggal 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan lahirlah partai keadilan. Almuzammil Yusuf, yang juga salah satu pendiri dari gagasan aktivis dakwah kampus dan di dalamnya juga ada aktivis dan tokoh KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang ikut memberi gagasan sebagai sayap muda Partai Keadilan Sejahtera. PKS lahir melalui gerakan sosial bernama Tarbiyah lalu bermutasi sebagai partai politik, basisnya ialah kelompok muslim terdidik, muda, dan kelas menengah kota. Pendirian Partai Keadilan terinspirasi dari gerakan timur tengah. Ada tiga tahapan kelahiran partai ini, yakni fase dakwah kampus, pembantuan gerakan mahasiswa dan gerakan politik. Dengan Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi yang menjadi panutannya. PKS juga menjadikan Lembaga Dakwah Kampus sebagai sumber rekrutmen kader.

## **B. Respon PKS Terhadap Pembangunan Kota Makassar**

### **1. Perda Baca Tulis Al-qur'an**

Setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya Perda baca Tulis Al Qur'an lahir di kota Makassar. Kepastian ini setelah DPRD Kota Makassar Mengesahkan Perda tersebut dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Senin (30/4) pukul 10.30 WITA. Dalam Ranperda ini diatur beberapa poin terkait dengan upaya peningkatan baca tulis Al

Qur'an di Kota Makassar. Tentu saja kita sebagai masyarakat muslim sangat bersyukur akan lahirnya perda ini. Ucapan terima kasih kepada DPRD Kota Makassar yang telah berinisiatif melahirkan Perda Baca Tulis Al Qur'an di Kota Makassar. Semoga menjadi amal jariyah untuk mereka. Diharapkan seluruh Guru Mengaji, santri, pemerhati TPA dan masyarakat umum dapat melaksanakan Perda ini agar menjadikan Kota Makassar menjadi Kota yang religius.

Dalam penetapan perda baca-tulis di kota makassar PKS sebagai partai da'wah memberikan dukungan penuh sehingga dalam mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan ideologi dan yang dicita-citakan PKS.

## 2. Reklamasi Pantai

Mengenai polemik hak angket reklamasi di kota makassar yang meliputi di wilayah Kecamatan Mariso, Tamalate dan Biringkanaya sepanjang 35 km masih dalam tahap proses. Sikap PKS sangat jelas bahwa PKS akan memepelajari dulu untuk memberikan jawaban. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mudzakkir Ali Djamil mengaku lebih memilih untuk menunggu dan akan mempelajari dasar penggunaan hak angket oleh Fraksi Golkar. Tetapi prinsipnya, kata MUdzakkir, Fraksi PKS siap untuk mendukung penggunaan hak angket jika dasar

yang digunakan memiliki bukti kuat atas pelanggaran dalam kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait proyek reklamasi yang dikerjasamakan pihak ketiga tersebut. Bahkan, Fraksi PKS, tambahnya, juga belum tahu apa konteks dari penggunaan hak angket dari teman-teman Fraksi Golkar. Apa yang dilakukan Fraksi Golkar patut diapresiasi jika memang menemukan adanya unsur penyimpangan dalam lahirnya kebijakan atas proyek.

### 3. Mendorong Partisipasi Politik

#### a. Memanfaatkan Media Sosial

Dalam mendorong partisipasi politik masyarakat kota makassar PKS yang berdasarkan secara islami yang dianut dan selalu melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi, hal itu dilakukan seperti saat ini dengan perkembangan teknologi, masyarakat kota makassar telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu PKS memanfaatkan peluang ini sebagai salah satu cara untuk memberikan pemahaman dalam pemberdayaan agar masyarakat kota makassar dan PKS mampu bersinergi dalam melakukan gerakan-gerakan pembaharuan. Saat ini PKS telah menghadirkan blogger pks, tv pks, facebook dan lain sebagainya sebagai media sosial yang mampu secara cepat dijangkau oleh masyarakat kota makassar. "Kami di PKS akan mempelajari

dulu," ungkap Mudazakkir yang juga Anggota Komisi C Bidang Pembangunan itu.

b. Diskusi Publik.

Melalui mekanisme diskusi publik partai keadilan sejahtera sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan secara struktur yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Diskusi publik ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa dan mendengar secara langsung argument para politisi, akademisi, pelajar dan masyarakat awam yang tidak paham dengan pembangunan politik khususnya di kota Makassar. Partai Keadilan Sejahtera selalu terjun langsung kelapangan melakukan observasi kedaerah-daerah yang sangat kecil sekali pun, semua itu dilakukan selain untuk menarik massa sebanyak-banyaknya dalam pemilihan mendatang dan untuk membantu memperdayakan masyarakat yang ada di kota Makassar.

c. Pandangan KAMMI terhadap PKS

KAMMI merupakan sebuah gerakan mahasiswa yang berbasis dakwah dan sosial politik, atau bisa pula disebut sebagai organisasi mahasiswa *profetik*, KAMMI secara struktural dan pergerakan, tidak ada bedanya dengan organisasi mahasiswa yang lain seperti BEM,

HMI, namun berstatus sebagai organisasi mahasiswa ekstern. Sedangkan PKS merupakan sebuah partai politik Islam yang berbasis dakwah, dan sebenarnya tidak berbeda dengan partai-partai Islam yang lain. Jika KAMMI dikatakan "anak" PKS, mungkin saja karena melihat sisi kedekatannya, atau bahkan melihat adanya organisasi mahasiswa yang memang betul-betul di-*becking* oleh parpol, seperti Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang merupakan *background* dari Nahdatul Ulama (NU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang juga merupakan *background* dari Muhammadiyah, atau yang lain..(afwan...pengetahuan saya masih terbatas tentang organisasi mahasiswa).

Sesuai yang diungkapkan oleh salah satu kader dari KAMMI yang tidak mau disebutkan namanya:

"Sejak lama saya ingin menyampaikan unek-unek saya tentang kegamangan akan pemahaman sebagian besar Kader KAMMI tentang memahami relasi antara PKS dan KAMMI. Terkadang sebagian kader KAMMI merasa tidak percaya diri ketika sering diidentikan dengan PKS. Ketidakpercayaan diri ini disebabkan mereka gagal paham akan relasi PKS dan KAMMI. Ada sebagian kader KAMMI yang berdiri pada posisi *extreme* terhadap PKS, menganggap KAMMI harus Oposisi dengan PKS. Pokoknya asal jangan PKS. Independensi yang dipahami adalah asal jangan diidentikan dengan PKS. Atau ada juga orang yang tidak ambil pusing dengan bagaimana relasi PKS dan KAMMI berjalan saja organisasi sambil menyimpan banyak pertanyaan. Dan gagal memahami mana perintah *murobbi* mana perintah organisasi. Gagal memahami peran, kapan sebagai kader partai kapan sebagai aktivis organisasi.

Memahami hubungan PKS dengan KAMMI, terletak pada kader PKS yang ada di organisasi KAMMI. bukan pada antar lembaga. Sekali

lagi terletak pada kader PKS yang juga anggota KAMMI. Itu faktanya. Relasi ini harus dipahami.”<sup>3</sup>

KAMMI merupakan organisasi mahasiswa yang **independen**, dan bukan *background* dari partai manapun termasuk PKS. Memang ada kedekatan antara kader KAMMI dan PKS, tetapi hal itu tidak ada unsur politik, namun lebih pada adanya persamaan visi dan misi antara KAMMI dan PKS, meski tidak bisa dipungkiri bahwa kader KAMMI ya simpatisan atau kader PKS, namun tidak semua kader PKS merupakan kader KAMMI. Visi yang sejalan dan seiring, membentuk seorang pemimpin yang berakhlak Islami, mampu memimpin seperti layaknya seorang pemimpin Islam (baca : khalifah). Selain itu pula, pembinaan kader (baca : kaderisasi) dalam tubuh KAMMI dan PKS memang sama, *tarbiyah*, pembinaan intensif seorang kader yang sering dilakukan tiap pekan. Apa yang saya uraikan diatas tidak bisa dijadikan dasar atau landasan untuk mengatakan bahwa KAMMI adalah PKS, karena secara pergerakan, jelas ada perbedaan tingkatan antara KAMMI dan PKS, PKS yang merupakan partai politik, tentu saja lebih banyak bergerak di pemerintahan, sedangkan KAMMI lebih berfokus pada lingkungan kampus dan sosial politik pemerintahan. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh KAMMI merupakan hasil penggodokan internal KAMMI dan tidak ada campur tangan apalagi intervensi dari pihak manapun atau partai apapun termasuk PKS. KAMMI pun bebas

---

<sup>3</sup> Wawancara di Kampus UNHAS pada tanggal 14 maret 2014 waktu; 11:00 WITA

bersuara, bebas dalam bergerak. KAMMI akan bertindak ketika ada penyimpangan yang terjadi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya dengan cara yang syar'i, dan bahkan KAMMI akan tetap melakukan penyikapan dan tindakan jika penyimpangan dan penyelewengan tersebut dilakukan oleh PKS.

KAMMI bersifat **independen**, KAMMI bukan organisasi yang *backing* oleh partai manapun. Adanya kedekatan dan kelengketan antara KAMMI dan PKS, itu tidak mengandung unsur politis, tetapi hanya karena persamaan prinsip yang dipegang teguh oleh KAMMI dan PKS.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan diskusi dan interpretasi yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya yang diangkat dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan yaitu:

Pemberdayaan masyarakat dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan publik suah dilaksanakan dan berhasil dijalankan oleh DPC PKS kota Makassar. Partisipasi tersebut dapat terwujud secara alami setelah kehadiran PKS ditengah-tengah masyarakat di Kota Makassar. Yang sudah didukung oleh masyarakat yang berdaya: yaitu, masyarakat yang penuh tanggung jawab terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penuh dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

PKS telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik yang ditopang oleh bidang kader yakni, melakukan penyuluhan dantata cara pemilihan yang baik, agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan pembekalan tentang kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi.

Strategi yang dilakukan PKS yakni selalu siap siaga turun langsung kelapangan melakukan observasi, dan lainnya kehadiran PKS di Kota Makassar dapat meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Penulis bersyukur atas selesainya skripsi ini mudah-mudahan tulisan yang sangat sederhana ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat dengan harapan sedikit lebih menambah pengertian dan ilmu dalam memahami demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, karena dua kunci itu dapat membawa masyarakat lebih berguna bagi bangsa dan negara.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi khususnya di Kota Makassar merupakan keharusan untuk diupayakan, dengan segala bentuk dan jenis kebijaksanaan dan strategi serta program atau kegiatan nyata berupa konsepsi dan upaya yang dilakukan oleh semua lapisan yang ada di Kota Makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim dan terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1995
- Amiruddin dan Assikin, Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Amos, Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Bagin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variam Kontemporer)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.
- Betham, David dan Boyle, Kevin. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, cet, ke-1
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2004.
- Budiman, Arief. *Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1
- Djalal, Abdoel. *Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Lemhans, 2001.

- Djiwandono, J. Soedjati. *Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula*, (The RI DEPISTITUTE, 2003
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009.
- Furqon, Aay Muhammad. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Teraju 2004.
- Herdi, Sahrasad. *PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan*, Jakarta: Psik Paramadina, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2005
- Ismail dan Mukti, Abdul (ed). *Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Mariam, Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- MD, Mahmud, *Hukum dan Pilar-Pilar Tentang Agama dan Demokrasi, Dalam Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1994, cet. Ke-2.
- Metodelogi Penelitian Sosial, *Penerapan dan Kebijaksanaan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Qadri, Ahmad Azizi. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: Lemhannas 2003.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Perlemen*, Yogyakarta: Lkis 2008.

Rusli, Muhammad Karim. Dkk. *Perjalanan Partai Politik di Indonesi*, Yogyakarta: CV. Rajawali-Jakarta, 1983.

Surbekti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Taimiyah, Ibnu. *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Dunia Ilmu, 1997.

Thontowi, Jawahir. *Islam Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press Yogyakarta, 2002.

Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Zada, Khamami dan Arafah, Arif, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004, cet. Ke-1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Partai Politik*, Bandung: Citra Umbara, 2008.

MPP PKS. *Plat Form Kebijakan Pembangunan PKS*, Jakarta: MAP PKS, 2008

#### **Artikel dari Internet**

[www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan dan transformasi politik :pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan%20dan%20transformasi%20politik.pdf), diakses pada tanggal 3 desember 2013

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis lahir di Bulukumba 16 April 1988, dari pasangan H. Abd Rasyid dan HJ. Darmawati, merupakan anak pertama dari empat orang bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di SD 234 Balibo Desa Balibo Kec Kindang Kab Bulukumba, Tahun (1999 – 2004). Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiah Babul Khaer Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Tahun (2004– 2006). Setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Bulukumba, (2006 – 2008). Setelah Tamat Penulis lanjut di UIN ALAUDDIN MAKASSAR, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik (S1), Selama menjadi Mahasiswa Penulis aktif di beberapa organisasi baik Intra maupun Ekstra diantaranya, Intra aktif dalam Organisasi Daerah di Kab.Bulukumba, sebagai Ketua IPMAH Kom. Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Tahun (2010-2012), Ekstra yaitu mengikuti Mapaba PMII Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, dan menjadi anggota. Kemudian menjadi pengurus HMJ Ilmu Politik Tahun (2008), setelah itu Penulis menjadi Pengurus BEM Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Demikianlah Biografi singkat Penulis yang telah meluluskan pendidikan Strata Satu (S1) di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik dengan gelar (S.IP).